

RELEVANSI *BALANCE OF THREAT* DALAM MENGENAL TRANSFORMASI KAPABILITAS PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2023

Muhammad Fauzan Rizki Ramadhan¹, Ahmad Rifki Nurfebriansyah²
^{1,2}Program Studi Ilmu Politik-Universitas Bakrie

Email: muhammad.ramadhan@bakrie.ac.id

Submitted: 17-04-2026; Accepted: 14-05-2026; Published :16-05-2026

ABSTRAK

Artikel ini berargumen bahwa perspektif Jepang terhadap ancaman global dan regional, mempengaruhi orientasi kebijakan pertahanannya. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan tahun 2023, Jepang telah memulai transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanan terbesar dalam sejarahnya semenjak Perang Dunia Kedua. Meski memiliki komitmen konstitusional pasifisme dan non-militerisme, serta masih terjebak dalam stagnasi ekonomi kepanjangan, ancaman yang dipersepsikan nyatanya cukup untuk memengaruhi kalkulasi strategisnya secara radikal. Dengan mengatasnamakan pertahanan diri, Tokyo rela untuk melepas secara gradual identitas tradisionalnya agar dapat lebih efektif menjawab secara mandiri ancaman-ancaman yang berasal dari negara revisionis di lingkungannya. Menggunakan teori *Balance of Threat*, dan desain riset kualitatif berlogika deduktif, artikel ini melihat bahwa keputusan transformasi pertahanan yang dilakukan Jepang merupakan suatu bentuk jawaban atas peningkatan persepsi ancaman dari negara tersebut, yang disebabkan oleh negara-negara agresif dan ambisius di lingkungannya seperti Korea Utara, Rusia, dan juga Cina. Tingginya persepsi ancaman tersebut dibuktikan dengan mengoperasionalkan empat variabel dari teori, yakni; agregat kekuatan, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan intensi ofensif, yang masing-masing memperlihatkan tren yang merugikan Tokyo. Hal ini kemudian menjadi justifikasi yang memaksa Jepang untuk merespon kondisi ini secara mandiri dengan melakukan transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanannya di tahun 2023, guna menjawab tantangan geopolitik keamanan yang semakin mendesak.

Kata kunci: Jepang; Kebijakan Pertahanan; Politik Luar Negeri; Ancaman

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2022, Kementerian Pertahanan Jepang mempublikasikan laporan komprehensif terkait strategi keamanan dan pertahanan negara tersebut. Buku putih pertahanan tahunan berjudul *'Defense of Japan'* (DOJ) tersebut telah lama berfungsi sebagai landasan akan bagaimana Tokyo menavigasi ruang lingkup internasionalnya dalam skala global. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, buku putih yang dirilis di tahun 2023 memperlihatkan adanya upaya transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanan mereka secara eksponensial, menandakan sebuah babak baru dalam kebijakan keamanan Negeri Matahari Terbit tersebut.

Secara umum, transformasi pertahanan yang dilakukan oleh Jepang meliputi dua hal; yakni dari sisi perlengkapan dan kebijakan (Japan Ministry of Defense, 2022). Dalam konteks perlengkapan, Jepang berupaya mendorong produktivitas industri pertahanan domestik dengan memberikan cara memberi subsidi-subsidi lukratif guna mendorong inovasi, serta aktif berkolaborasi dengan mitra eksternal, khususnya negara-negara yang Eropa dan Amerika Serikat (Japan Ministry of Defense, 2022; Japan Ministry of Foreign Affairs, 2022). Selain itu, Jepang berkeputusan untuk menambah persediaan penangkal rudal balistik menengah-jauh, serta mengintegrasikan peralatan penangkal teknologi tanpa awak secara masif (Japan Ministry of Defense, 2022; SIPRI, 2023). Tetapi perubahan paling radikal terletak pada upaya Jepang memulai akuisisi persenjataan yang di desain untuk tujuan ofensif. Tokyo secara terbuka menyatakan akan mulai memproduksi dan mengerahkan dalam jumlah besar rudal jelajah jarak jauh *Tomahawk* dan rudal hipersonik HVGP di akhir tahun 2023 (Japan Ministry of Defense, 2022; Japan Ministry of Foreign Affairs, 2022). Pusat transformasi kapabilitas ofensif ditunjukkan dengan rencana mengimpor dan memodifikasi pesawat tempur siluman F-35B *Lightning II* dari Amerika Serikat, serta rencana konversi kapal perusak *JS Izumo* dan *JS Kaga* menjadi kapal induk yang keduanya telah berhasil

dilakukan di tahun 2024 dan 2025 (Japan Ministry of Defense, 2022; Panella, 2024; Nagatomi, 2025). Kedua teknologi tersebut umum dianggap oleh kajian keamanan internasional sebagai persenjataan yang ditujukan untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar batas teritorialnya, sesuatu yang cukup asing jika berbicara mengenai Jepang (Rubel, 2011; Lucev, 2014).

Sementara pada sisi kebijakan, di samping memperkuat ikatan aliansi eksternal dengan mitra terkuatnya, yaitu Amerika Serikat, Jepang juga berencana untuk mengkaji kembali pendekatan ataupun doktrin pertahanan dan angkatan bersenjata. Salah satu contoh adalah keputusan Tokyo untuk meninggalkan batas artifisial 1% anggaran pertahanan yang telah lama dimandatkan oleh konstitusi negara tersebut pasca Perang Dunia Kedua (Japan Ministry of Defense, 2022b). Jepang akan mulai menggunakan setidaknya 2% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk keperluan pertahanan, yang kemudian merambat pada kembalinya perdebatan terkait relevansi 'Artikel 9'¹ di politik nasional (Japan Ministry of Defense, 2022; Asia Pacific Foundation of Canada, 2023). Selain itu, gagasan-gagasan perdamaian klasik yang kerap muncul dalam buku putih tahun-tahun sebelumnya, seperti 'netralitas tanpa senjata' dan 'pasifisme absolut', mulai terlihat berkurang (Japan Ministry of Defense, 2022). Pada aspek doktrin militer, Jepang mulai mengadopsi doktrin atau taktik bernama *'counterstrike capabilities'*, memperbolehkannya untuk melancarkan serangan balasan langsung ke wilayah musuh (Japan Ministry of Defense, 2022). Transformasi strategi dan alat persenjataan di atas bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan.

Segegap perilaku di atas, menandakan bahwa Jepang mulai perlahan menanggalkan ketergantungan keamanannya terhadap Amerika Serikat, dan memulai untuk bertanggung jawab atas pertahanan mereka secara mandiri. Hal ini

¹ Artikel 9 merupakan produk dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menetapkan bahwa secara konstitusional, negara tersebut menolak perang sebagai metode penyelesaian sengketa internasional,

yang juga memandatkannya untuk membatasi perang dan kekuatan militer sebagai suatu instrumen untuk memenuhi kepentingan luar negerinya (Prime Minister's Office of Japan, n.d.)

juga didorong oleh peningkatan persepsi ancaman yang didasarkan oleh perspektif terhadap lingkungan eksternalnya. Tokyo secara eksplisit menyatakan bahwa Jepang dihadapkan oleh ancaman besar terhadap kedaulatan dan kebebasannya, yang berasal dari “...negara-negara revisionis Asia yang berupaya mengubah kondisi *status-quo* secara unilateral” (Japan Ministry of Defense, 2022). Pernyataan tersebut tentunya ditujukan pada Rusia, Korea Utara, dan terutama juga Cina, yang kerap berupaya memenuhi kepentingan mereka melalui jalur koersif. Konflik Rusia-Ukraina, keberlanjutan uji coba program rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara, serta modernisasi dan penumpukan militer Cina, merupakan segenap perilaku yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah Jepang (Japan Ministry of Defense, 2022; Dooley, 2023; Kosuke T., 2023; Wang, 2023). Kekhawatiran juga meningkat ketika mengingat bahwa Jepang sampai dengan saat ini masih memiliki isu persengketaan dengan Rusia dan Cina di Pulau Kuril dan Senkaku (Japan Ministry of Defense, 2022). Kenyataan ini kemudian mengembalikan tidak hanya isu konflik dan pertahanan strategis dalam kamus kebijakan luar negeri Jepang, tetapi juga kajian terkait peningkatan ancaman dalam konteks relasi antar negara.

Transformasi besar dari doktrin dan kapabilitas pertahanan Jepang di tahun 2023 tentunya merupakan suatu hal yang di luar kebiasaan. Menurut beberapa penelitian seperti Anderson (2016) dan Juanbo (2019) Jepang sampai saat ini belum pulih dari stagnasi ekonomi tahun 1990 yang kerap disebut sebagai ‘*The Lost Decade*’. Stagnasi ini menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan hutang negara, yang kemudian sering dijadikan alasan untuk berfokus murni pada isu ekonomi dan menyerahkan urusan pertahanan kepada Amerika Serikat (Sutardi & Pasha, 2025). Selain itu, penelitian lain memperlihatkan juga adanya hambatan lain yang bersumber dari artikel 9, di mana isu mengenai remilitarisasi ataupun reorientasi pertahanan bertajuk ofensif berpotensi menjadi wacana yang memecah-belah (Yokodaido, 2019). Hal ini membuat topik ini menjadi menarik untuk dikaji secara lebih ekstensif.

Pada dasarnya, topik mengenai reorientasi pertahanan dan remilitarisasi Jepang merupakan topik yang kerap dibahas dalam tinjauan terkait dinamika politik internasional. Tetapi beberapa penelitian misal, melihat bahwa

upaya di atas hanya sebagai mekanisme untuk memperkuat ketahanan nasional secara minimal, sekaligus menunjukkan pada derajat tertentu komitmennya terhadap aliansi Jepang dengan Amerika Serikat dan juga tatanan dunia liberal (Canfield & Haddad, 2021; Nakano, 2023; Bochorodycz, 2024). Sementara penelitian lain lebih berfokus pada perspektif *society-centric*, melihat bahwa perilaku transformasi tersebut akibat irisan antara identitas historis Jepang dengan tekanan domestik pada level birokrasi pemerintahan dan publik (Singh, 2016; Gustafsson, 2020; Ha & Hagstrom, 2023). Di sisi lain, terdapat juga penelitian yang mengasosiasikan dinamika krusial dalam sejarah kebijakan keamanan Jepang di atas dengan faktor-faktor ideasional, seperti idiosinkrasi dan pemikiran dari pemimpin-pemimpin nasional Jepang ataupun faksi-faksi internal yang ada pada parlemen negara tersebut (Liff, 2018; Hughes, 2016; Hughes et al., 2021; Govindasamy, 2023). Tetapi, tulisan ini melihat bahwa perspektif-perspektif di atas luput dalam mengkaji salah satu elemen penting yang sejak lama dianggap krusial dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Menanggapi kekurangan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berupaya melihat alasan transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang di tahun 2023 dengan merujuk pada unsur mendasar dalam kajian perpolitikan internasional, yaitu persepsi ancaman. Penelitian ini melihat bahwa dengan merelevansikan seberapa besar kekhawatiran yang dirasakan oleh Jepang, dapat membantu menjawab motif dibalik keputusan Tokyo meminimalisir ketergantungan terhadap pihak luar, dan memulai reorientasi dan remilitarisasi terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, penelitian ini akan merelevansikan kembali teori klasik *Balance of Threat* beserta variabel operasionalnya untuk mengkaji persepsi ancaman Jepang terhadap lingkungan eksternalnya.

Sepanjang sejarah politik internasional, persepsi mengenai ancaman memainkan peran penting dalam mempengaruhi interaksi antar aktor negara. Persepsi tersebut dapat muncul dari faktor eksogen maupun endogen, yang kemudian berdampak pada proses formulasi kebijakan

luar negeri sebuah negara (Landau-Wells, 2024). Penelitian ini melihat bahwa keputusan Jepang untuk melakukan transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanannya dapat diatributkan pada persepsi ancaman, dan bisa dijelaskan menggunakan teori *Balance of Threat*. Dalam studi politik internasional, teori ini mampu melihat serta memahami bagaimana perilaku suatu negara yang kemudian dipersepsikan sebagai ancaman dapat berdampak pada kebijakan luar negeri dari negara lain. Penggunaan teori ini didasarkan oleh beberapa hal. Pertama, teori ini memberi atensi besar tidak hanya pada perolehan dan distribusi kekuatan dari negara, tetapi juga intensi atau niat dari perilaku yang ditampilkan. Kedua, teori ini bisa memperlihatkan alasan Jepang untuk melakukan hal di atas meski mempunyai isu terkait moral dan materiil. Terakhir, teori yang menjadi bagian dari paradigma besar realisme ini mampu memberikan gambaran jelas bagaimana sebuah negara dihadapkan oleh sebuah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh negara lain sebagai akibat dari relasi bersifat konfliktual yang dipenuhi oleh agresi dan ketakutan.

Secara konseptual, *Balance of Threat* merupakan sebuah teori yang berkembang dari teori *Balance of Power* yang keduanya bersumber dari kajian realisme struktural. Realisme struktural merupakan paradigma yang berkembang dari realisme klasik yang menekankan signifikansi sifat inheren manusia dalam memaksimalkan kekuatan dan keamanan sebagai faktor penentu perilaku negara. Dalam hal ini realisme struktural melihat bahwa yang perilaku kompetitif negara bukan didasarkan oleh sifat humanisme, melainkan kondisi sistem dunia yang anarkis sehingga memaksa negara untuk mengumpulkan kekuatan demi menjalin keselamatannya. Paradigma realisme struktural kemudian menjadikan *balance of power* sebagai teori inti dari kajiannya.

Dalam hal ini, *Balance of Power* berasumsi bahwa negara berpotensi melakukan gerakan penyeimbangan terhadap negara lain yang dianggap memiliki kekuatan berlebih (Waltz, 1979). *Balance of Power* lebih lanjut berargumen bahwa negara dalam sistem internasional yang anarkis umumnya melakukan manuver seperti *balancing* dan *bandwagoning* untuk menanggapi intensnya akumulasi kekuatan negara lain. *Balancing* di sini dipahami sebagai strategi di mana negara berupaya

menyeimbangkan akumulasi kekuatan baik dengan menyusun atau bergabung dengan aliansi (*external balancing*), atau memobilisasi sumber daya dan kapabilitas secara mandiri (*internal balancing*), guna menyamai jumlah kekuatan negara lain (Walt, 1985; Mearsheimer, 2001). Sementara *bandwagoning* merupakan strategi di mana negara memutuskan untuk berpihak dengan negara yang lebih kuat, baik demi memastikan keselamatan atau meraih konsesi dan keuntungan (Walt, 1985; Schweller, 1994). Nyatanya, faktor yang benar-benar problematik dalam kajian politik internasional adalah bagaimana kekuatan tersebut digunakan sebagai tujuan ofensif/negatif. Bertindak sebagai pembaharuan teori *Balance of Power*, *Balance of Threat* melihat bahwa negara merespon tidak kepada akumulasi kekuatan semata, melainkan terhadap penggunaan kekuatan tersebut untuk perilaku yang dapat melukai dan menimbulkan persepsi ancaman (Walt, 1985). Dalam sebuah sistem internasional berbasis anarki, negara dengan intensi yang negatif akan lebih memungkinkan mengundang reaksi antagonis (Walt, 1985; Person, 2017).

Terdapat empat faktor utama yang digunakan untuk mengukur ancaman yang ditimbulkan oleh sebuah negara yang dikatakan mengancam (Walt, 1985). Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) agregat kekuatan, (2) kedekatan geografis, (3) kekuatan ofensif, dan yang terakhir adalah (4) intensi ofensif.

Faktor pertama berbicara mengenai agregasi dari kekuatan sebuah negara. Walt (1985) menjelaskan bahwa agregasi kekuatan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Nye (1990) sebagai *hard power*. Hal ini berkaitan dengan sesuatu yang *tangible* seperti jumlah total populasi, kapabilitas industri, ukuran militer dan ekonomi, ataupun penguasaan teknologi (Walt, 1985). Negara dengan agregat kekuatan yang besar, mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi ruang geopolitik negara lain, baik melalui persuasi ataupun koersi, sehingga bisa memunculkan dan meningkatkan persepsi ancaman.

Faktor kedua berbicara terkait kedekatan geografis antara negara yang

mengancam dengan yang merasa diancam. Walt (1985) melihat bahwa jarak memainkan peran penting dalam mengukur tingkat ancaman yang dipersepsikan oleh sebuah negara. Negara lebih mungkin bereaksi dari ancaman yang cenderung lebih dekat dengan wilayah kedaulatannya (Walt, 1985).

Faktor ketiga adalah kapabilitas ofensif. Kapabilitas ofensif yang dimaksud merupakan kemampuan militer yang digunakan untuk melakukan ekspedisi/penyerangan menuju wilayah negara lain (Walt, 1985). Walt (1985) berargumen bahwa semakin besarnya kapabilitas ofensif suatu negara, maka persepsi ancaman yang diproyeksikan oleh negara tersebut juga semakin besar. Mearsheimer (2001) menambahkan bahwa kemampuan ofensif tidak hanya melihat seberapa besar kapabilitas militer yang dimiliki, tetapi juga memperhitungkan kecepatan kapabilitas tersebut dalam konteks penaklukan. Semakin cepat penaklukan (*conquest*) dapat dipenuhi, maka hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan meningkatkan persepsi ancaman.

Faktor terakhir yang mempengaruhi persepsi ancaman sebuah negara adalah intensi ofensif. Intensi ofensif merupakan faktor yang paling penting, sekaligus yang membuat teori *Balance of Threat* berbeda secara teoritis dengan *Balance of Power*. Faktor ini berbicara mengenai sikap negara yang dipersepsikan sebagai ancaman. Negara dengan sikap yang agresif dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya, akan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara lain (Walt, 1985). Walt (1985) bahkan menekankan bahwa negara dengan agregasi kekuatan yang tidak terlalu besar, tetap dapat dipersepsikan sebagai ancaman ketika memiliki kebijakan luar negeri yang ambisius ataupun ekspansionis. Hal ini dikarenakan negara pada dasarnya dapat menoleransi peningkatan agregat kekuatan dari negara lain, tetapi tidak pada peningkatan agresivitas.

METODE

Dalam rangka melakukan analisis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan bertajuk kualitatif dengan logika deduktif. Penelitian kualitatif secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu bentuk desain riset yang menekankan pada penggunaan bahasa dibandingkan dengan angka atau perhitungan (Bryman, 2012). Model penelitian ini umumnya

bertujuan untuk memahami suatu makna, pengalaman, atau proses dari suatu fenomena sosial untuk ditafsirkan agar menemukan pola, tema, ataupun penjelasan (Bryman, 2012). Sementara itu, logika deduktif di sini menandakan bahwa penelitian memanfaatkan kerangka konsep atau teori yang sudah ada sebelumnya, untuk dihadapkan pada topik dari penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dominan menggunakan *desk/library research*, di mana data yang diperoleh umumnya terbagi dalam dua bentuk, yakni primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini berasal terutama dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku putih pertahanan Jepang tahun 2023 dan laporan keuangan pertahanan kementerian pertahanan dan liar negeri Jepang tahun 2022. Sementara itu, data sekunder pada penelitian ini meliputi penelitian-penelitian terdahulu seperti Gustafsson (2020), Hughes et al (2021), Govindasamy (2023), Ha & Hagstrom (2023), dan Matsuda (2023), laporan ataupun segala sumber pemberitaan yang relevan terkait kebijakan pertahanan Jepang di tahun tersebut. Setelah dikumpulkan, data di atas akan dihadapkan proses evaluasi untuk memastikan konsistensi dan relevansinya terhadap indikator kerangka teori yang digunakan. Evaluasi ini menggunakan proses triangulasi dengan data-data lain untuk memastikan keabsahan dan tidak membatasi pada satu interpretasi saja (Lamont, 2015). Jangka waktu data yang dipilih tentunya mencakup sejak sebelum diumumkannya keputusan Jepang untuk melakukan transformasi pertahanan di tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggunakan teori *Balance of Threat*, penelitian ini melihat bahwa keputusan Jepang untuk melakukan transformasi dan peningkatan kapabilitas militer secara eksponensial pada tahun 2023 di dorong terutamanya oleh peningkatan persepsi ancaman. Dalam hal ini, Jepang merasa khawatir bahwa tiga negara yang dianggap sebagai ancaman terbesar, yakni Rusia, Cina, dan Korea Utara, tidak hanya sedang memupuk kekuatan dan kapabilitas dalam kuantitas yang signifikan, tetapi juga

menunjukkan secara berulang perilaku yang dapat dikategorikan agresif dan asertif dalam rangka memenuhi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan nasional. Jepang harus dihadapi suatu kenyataan pahit bahwa lingkungan eksternalnya semakin diisi oleh aktor-aktor negara yang memiliki ambisi ekspansionis dan sikap revisionis.

Demi menghadapi realitas geopolitik tersebut, Jepang memilih untuk tidak hanya mengandalkan relasi aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat, tetapi juga mengambil langkah-langkah drastis dengan meluncurkan agenda transformasi pertahanan dan peningkatan kapabilitas militer secara besar-besaran. Hal ini tidak hanya mengafirmasi tingginya tingkat persepsi ancaman yang dirasakan oleh Tokyo pada saat itu, namun mengafirmasi kembali kajian mengenai ancaman dalam memengaruhi interaksi antar aktor negara. Maka, dalam rangka menganalisis mengenai persepsi ancaman yang dirasakan oleh Jepang, penelitian ini akan mengoperasikan empat indikator dari teori *Balance of Threat*, yaitu; 1) agregat kekuatan, 2) kedekatan geografis, 3) kapabilitas ofensif, dan juga 4) intensi ancaman atau ofensif. Diharapkan dengan mengoperasionalkan empat indikator tersebut mampu untuk bisa mengukur atau memberikan gambaran akan ancaman yang dirasakan oleh Jepang.

Indikator Pertama: Agregat Kekuatan

Tabel 1. Perbandingan agregat kekuatan dari keempat negara pada tahun 2022

Negara	Cina	Rusia	Korea Utara	Jepang
Populasi	1.41 Miliar	146.6 Juta	26,16 Juta	125,1 Juta
Personel Aktif	2.000.000	1.190.000	1.280.000	247.150
Personel Cadangan	510.000	280.000	600.000	55.900
PDB (USD)	17.96 Triliun	2.24 Triliun	18.7 Miliar	4.30 Triliun
Anggaran Pertahanan (USD)	242 Miliar	85 Miliar	No Data	48 Miliar

Sumber: Kementerian Pertahanan Jepang (2022), Departemen Pertahanan Amerika Serikat (2022), IISS (2023), SIPRI (2023), World Bank (n.d.).

Sesuai dengan tabel perbandingan di atas, terdapat disparitas agregat kekuatan yang cukup terlihat di antara keempat negara. Sebagai negara

yang dianggap sebagai penantang utama Amerika Serikat, Cina tentunya memiliki keunggulan, khususnya mengenai kapasitas ekonomi/industri dan juga militer. Sampai dengan tahun 2022, PDB Cina telah mencapai angka 17,96 Triliun USD, dan merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (World Bank, n.d.). Menguasai beberapa aspek ekonomi dan perdagangan seperti manufaktur, peralatan elektronik, otomotif, persenjataan dan semikonduktor, Cina secara perlahan menjadi satu kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Perkembangan ekonomi yang pesat tersebut tentunya berimbas pada anggaran belanja pertahanan. Cina mendedikasikan 2% dari PDB untuk mendanai upaya remilitarisasi dan modernisasi persenjataannya secara konstan sejak tahun 2014 (IISS, 2023). Tujuannya adalah untuk menyusun sebuah armada militer ‘kelas dunia’ yang mampu menjaga kedaulatan serta memproyeksikan kekuatan Cina (U.S Department of Defense, 2022). Bersamaan dengan upaya modernisasi, Cina juga meningkatkan jumlah personel militernya secara masif. Berdasarkan data IISS (2023), Di akhir tahun 2022 total akumulasi personel militer dari segala cabang berjumlah lebih dari 2,5 juta tentara. Angka tersebut efektif menjadikan Cina sebagai kekuatan militer terbesar di dunia secara kuantitas personel, diikuti oleh India dan Amerika Serikat (IISS, 2023).

Serupa dengan Cina, Rusia juga memiliki agregat kekuatan yang cukup besar. Mewarisi sejarah Uni Soviet, Rusia kontemporer masih mempertahankan armada militer konvensional dan non-konvensional yang cukup masif. Meskipun belum menyamai kuantitas dari kekuatan militer Cina, armada perang Rusia dipenuhi oleh persenjataan modern serupa dengan Amerika Serikat, yang di danai melalui anggaran pertahanan sebesar 5% dari total PDB (SIPRI, 2023). Tidak lupa bahwa Rusia juga memiliki jumlah personel aktif yang terbilang cukup besar, yakni hampir mendekati 1,5 juta personel (IISS, 2023). Pada hakikatnya, jumlah persentase anggaran pertahanan Rusia dan total personel aktif di atas, merupakan salah satu dampak dari konfliknya dengan Ukraina

yang masih berlanjut sampai dengan saat ini (IISS, 2023; SIPRI, 2023). Meskipun memiliki anggaran pertahanan yang tinggi, perekonomian Rusia sendiri pada dasarnya tidak pada kondisi yang baik. Dengan total PDB sebesar 2,24 triliun USD, Rusia berada di bawah Cina dan Jepang dalam hal kapabilitas ekonomi dan industri (The World Bank, n.d.). Hal ini dikarenakan sedikitnya *output* perekonomian Rusia yang hanya ditopang melalui kegiatan perdagangan persenjataan dan sumber daya alam (Bradshaw & Connolly, 2016; SIPRI, 2023).

Analisis terkait agregat kekuatan Korea Utara terbilang cukup sulit. Pasaunya, negara yang dijuluki sebagai *'Hermit Kingdom'* tersebut tidak secara jelas mempublikasikan data terkait kapabilitas ekonomi ataupun militernya. Data yang diperoleh Agensi Intelijen Amerika Serikat (2021) dan juga lembaga penelitian seperti IISS (2023) dan juga SIPRI (2023), merupakan hasil dari kalkulasi probabilitas serta perhitungan kasar dari masing-masing institusi yang bergantung pada data yang dapat dikatakan cukup usang atau belum terkonfirmasi secara pasti. Berpaku pada data di atas, terlihat bahwa Korea Utara tidak memiliki PDB ataupun total populasi yang masif. Tertutupnya negara tersebut dari rantai perekonomian dunia, memberikan pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan sosio-ekonominya yang cenderung mengalami stagnasi. Kecilnya kapabilitas ekonomi dan industri, berimbas pada rendahnya ketahanan dan kesejahteraan dari masyarakat Korea Utara. Hal ini kemudian berdampak pada total populasi negara tersebut yang relatif kecil dan kurang berkualitas. Satu-satunya keunggulan dari agregat kekuatan Korea Utara terletak pada jumlah personil yang dimiliki, dikarenakan berlakunya kebijakan wajib militer bagi masyarakat Korea Utara (Radio Free Asia, 2021). Dapat disimpulkan bahwa agregat kekuatan yang dimiliki Korea Utara, sangat kecil jika dibandingkan dengan Cina, Rusia dan juga Jepang.

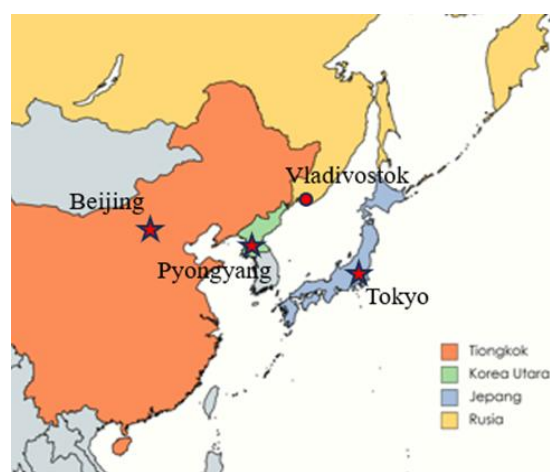
Berdasarkan data di atas, Jepang dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan Rusia ataupun Cina dalam indikator agregat kekuatan. Walaupun memiliki kapasitas ekonomi yang cukup besar berkat industri manufaktur dan teknologi serupa dengan Cina, Jepang tidak mendedikasikan porsi yang berarti terhadap anggaran belanja militernya yang masih berada di angka 1% dari total PDB. Tentunya hal ini dikaitkan dengan komitmen Jepang terhadap

limitasi konstitusional yang dimuat dalam artikel 9. Bersamaan dengan performa ekonomi yang cenderung menurun, kedua hal tersebut seolah bertindak sebagai *'rem artifisial'* dari adanya upaya peningkatan anggaran pertahanan yang memungkinkan Jepang untuk melakukan transformasi dan peningkatan signifikan pada aspek militernya. Permasalahan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah populasi Jepang dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Indikator Kedua: Kedekatan Geografis

Pada dasarnya, jarak batas teritorial antara Jepang, Korea Utara, Rusia, dan Cina cukup berdekatan. Hal ini dikarenakan keempat negara tersebut memiliki porsi wilayah yang cukup signifikan di benua Asia. Jepang, Korea Utara dan Cina memang merupakan negara yang menjadi bagian dari wilayah Asia Timur (Ross, 1999). Sedangkan bagi Rusia, walaupun ibu kota Moskwa merupakan bagian dari Eropa Timur, negara tersebut memiliki kota pelabuhan Vladivostok yang terletak di Laut Jepang, yang merupakan ibu kota dari salah satu provinsi terbesar di Rusia, yaitu Primorsky Krai (Ross, 1999).

Gambar 1. Peta geografis ibu kota Jepang, Korea Utara, Rusia, dan Cina



Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa jarak dari keempat negara cukup berdekatan. Namun dapat dilihat bahwa ancaman terdekat dari Ibu Kota Tokyo

adalah Pyongyang dan Vladivostok. Perihal Vladivostok, ibu kota provinsi tersebut merupakan rumah bagi armada pasifik dari angkatan laut Rusia (Kjellen, 2022). Walaupun mayoritas persenjataan di pelabuhan tersebut dikerahkan menuju Eropa Timur sebagai imbas dari konflik dengan Ukraina, armada Pasifik Rusia masih memiliki sejumlah aset yang cukup signifikan (Kjellen, 2022; IISS, 2023). Armada tersebut memiliki jumlah kapal selam terbanyak, termasuk di antaranya kapal selam nuklir kelas *Borei* dan *Kilo*, yang merupakan salah satu kapal selam terancang di dunia (IISS, 2023). Kapal selam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai persenjataan konvensional, namun juga sebagai *platform* bagi rudal balistik antar benua yang dapat diluncurkan dengan cepat (IISS, 2023). Sementara Pyongyang sendiri merupakan Ibu Kota dari Korea Utara, sekaligus pusat dari komando militernya. Segala pergerakan angkatan perang ataupun persenjataan negara tersebut, merupakan hasil dari instruksi dari Komite Urusan Negara yang merupakan badan perumus kebijakan tertinggi di Korea Utara (IISS, 2023).

Meskipun terdapat jarak yang cukup substansial antara Beijing dengan Tokyo, kedua negara berbagi wilayah kepentingan di Laut Cina Selatan. Perseteruan terkait kepemilikan Pulau Senkaku sampai saat ini menjadi sumber ketegangan di antara Cina dan Jepang (London, 2022). Hal ini kemudian juga membentuk persepsi ancaman Jepang terhadap adanya upaya pelanggaran wilayah teritorial. Peta di atas juga menunjukkan sebuah fakta bahwa Jepang secara geografis, dikelilingi oleh negara yang berseberangan secara orientasi politik dan kebijakan luar negerinya. Terlebih lagi, Rusia dan Cina merupakan negara revisionis yang memiliki agregat kekuatan yang masif, serta kebijakan luar negeri yang ambisius. Hal ini tentunya mempengaruhi persepsi ancaman Jepang terhadap lingkungan geopolitiknya.

Indikator Ketiga: Kapabilitas Ofensif

Tabel 2. Perbandingan kapabilitas ofensif yang dimiliki keempat negara pada tahun 2022

Negara	Cina	Rusia	Korea Utara	Jepang
Tank	4.800 Unit	1.800 Unit	3.500 Unit	555 Unit
Artileri	9.550 Unit	4.458 Unit	21.600 Unit	1.593 Unit
Pesawat Tempur	2.250 Unit	1.350 Unit	545 Unit	519 Unit

Kapal Induk	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
Kapal Perang	92 Unit	31 Unit	2 Unit	24 Unit
Kapal Selam	59 Unit	51 Unit	71 Unit	50 Unit
Hulu Ledak Nuklir	410 Keping	5.889 Keping	No Data	0 Keping
Rudal Balistik	250 Unit	+339 Unit	10+ Unit	0 Unit

Sumber: Kementerian Pertahanan Jepang (2022), IISS (2023), SIPRI (2023).

Berkaca pada tabel di atas, pola yang sama kembali terlihat di mana Cina memiliki superioritas dalam kuantitas kapabilitas ofensif yang biasanya termaktub dalam kemampuan militer dari sebuah negara. Terdapat kesenjangan yang cukup terlihat di mana akumulasi peralatan militer Cina mengerdikan Jepang di seluruh aspek ofensif. Jika dibandingkan dengan keempat negara di atas, Cina unggul dalam jumlah tank, pesawat tempur kapal induk dan kapal perang permukaan serta satelit intelijen. Tidak lupa bahwa meskipun memiliki jumlah yang rendah dibandingkan dengan Rusia, armada rudal balistik dan hulu ledak nuklir Cina merupakan instrumen penting dalam persenjataan negara tersebut (IISS, 2023; SIPRI, 2023).

Uniknya, Kementerian Pertahanan Jepang (2022) berfokus pada satu aspek yang dianggap krusial dan simbolik terhadap kapabilitas ofensif Cina, yakni keberadaan kapal induknya. Aktivitas dari kapal induk *Liaoning* dan *Shandong* merupakan ancaman yang cukup serius terhadap Jepang. Kedua kapal induk tersebut sering melakukan *show of force* dengan melakukan patroli di wilayah Laut Cina Selatan (Japan Ministry of Defense, 2022). Sebagaimana argumentasi dari Rubel (2011), kapal induk merupakan instrumen proyeksi kekuatan yang secara spesifik di desain untuk memberikan pengaruh diplomatik bertajuk koersi. Hal ini sesuai dengan penelitian Tsai & Liu (2023) yang melihat bahwa seiring dengan selesainya kapal induk pertama yakni *Liaoning* pada tahun 2012, terdapat perubahan strategi laut Cina yang secara gradual meningkatkan daerah operasi armada lautnya hingga mencakup Samudera Pasifik. Kapal induk tersebut secara

langsung memperluas jangkauan pesawat tempur Cina yang kemudian dapat digunakan untuk menyerang wilayah Jepang lewat jalur maritim (Japan Ministry of Defense, 2022). Ancaman tersebut diperparah saat Cina mengumumkan bahwa kapal induk ketiga yang diberi nama *Fujian*, sedang dalam tahap uji coba dan akan dioperasikan dalam waktu dekat (Xuanzun, 2023). Oleh karena itu, eksistensi dari kapal induk Cina sebagai alat proyeksi kekuatan dipersepsikan sebagai suatu kapabilitas ofensif yang dapat mengganggu kedaulatan Jepang secara serius.

Terkenal sebagai kekuatan tradisional Eropa, tentunya Rusia memiliki akumulasi kapabilitas ofensif yang cukup masif. Meskipun tertinggal secara kuantitas dari Cina, armada ofensif Rusia memiliki tingkat kecanggihan yang sepadan dengan Amerika Serikat. Namun, keunggulan kapabilitas ofensifnya terletak pada variasi dan kuantitas dari rudal balistik dan hulu ledak nuklir. Data yang ada pada SIPRI (2023) menunjukkan bahwa Rusia menyimpan total 5,889 keping hulu ledak nuklir, merupakan negara dengan jumlah terbesar dan bertanggungjawab terhadap 40% dari total hulu ledak nuklir di dunia. Beriringan dengan kuantitas hulu ledak nuklir, Rusia juga mengembangkan secara ekstensif rudal balistik multi-rentang yang dimanfaatkan sebagai instrumen transportasi hulu ledak tersebut. Berdasarkan data IISS (2023), rudal balistik Rusia R-36 mampu menempuh jarak sejauh 16.000 Km dan menghancurkan sasaran strategis seperti industri dan pusat kota. Terlebih lagi pada akhir tahun 2022, Rusia mulai mengembangkan variasi terbaru bernama *Sarmat* yang memiliki jarak tempuh sejauh 18.000 Km (Trevelyan, 2022). Sebagai perbandingan, rudal balistik terancang Amerika Serikat yang bernama *Minuteman III*, hanya mampu menempuh 14.000 Km (IISS, 2023). Dengan demikian, perkembangan serta aktivitas rudal balistik antar benua Rusia kapabilitas ofensif yang juga dipertimbangkan oleh Jepang.

Korea Utara sendiri pada dasarnya tidak memiliki kapabilitas ofensif yang berarti. Meskipun data di atas menunjukkan angka yang cukup besar, nyatanya kapabilitas ofensif Korea Utara dapat dikatakan usang dalam hampir seluruh aspek (IISS, 2023; SIPRI, 2023). Beberapa artikel bahkan menyebutkan bagaimana Korea Utara sendiri masih bersandar pada penggunaan perlengkapan militer, kapal perang dan pesawat tempur era Perang Dingin (Kwak,

1990; Mizokami, 2021). Satu-satunya bentuk kapabilitas ofensif Korea Utara adalah kemungkinan eksistensi dari hulu ledak nuklir dan rudal balistik yang sampai saat ini masih dalam kuantitas yang masih minim, dan belum terbukti kapabilitas dan kesuksesannya (IISS, 2023). Dengan demikian, satu-satunya kapabilitas ofensif Korea Utara adalah jumlah peralatan konvensional yang sudah tertinggal zaman.

Jepang sendiri pada dasarnya tidak memiliki instrumen yang dapat dikategorikan sebagai kapabilitas ofensif sebelumnya. Kembali lagi, hal ini merupakan bagian dari limitasi konstitusional yang ada pada artikel 9 (Japan Ministry of Defense, 2022). Artikel tersebut mempengaruhi Jepang untuk tidak memiliki apa yang disebut sebagai kapabilitas ofensif. Komitmen tersebut kemudian terefleksi dari susunan perlengkapan, persenjataan serta doktrin taktis dari JSDF (*Japanese Self Defense Force*). Angkatan perang Jepang sampai dengan tahun 2022, tidak memiliki kemampuan untuk memperluas kontrol keamanan di luar batas teritorialnya (Japan Ministry of Defense, 2022). Alih-alih mencoba untuk melakukan *deterrence* terhadap ancaman, Jepang justru bergantung pada kapabilitas ofensif dari Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan utamanya. Kapal induk serta pesawat tempur siluman Amerika Serikat sering menjadikan Jepang sebagai pangkalan berlabuh dan pengisian ulang bahan bakar. Sehingga dapat dikatakan bahwa Jepang tertinggal dalam hal kapabilitas ofensif, khususnya dengan Cina dan Rusia.

Indikator Keempat: Intensi Ofensif/Ancaman

Faktor terakhir sekaligus yang terpenting adalah intensif ofensif. Pada dasarnya, intensi ofensif dari ketiga negara tersebut cukup terlihat. Baik Cina, Rusia maupun Korea Utara, merupakan negara revisionis yang sering mempengaruhi ruang geopolitik negara lain dengan mengatasnamakan kepentingan nasionalnya. Hal ini merupakan wujud pertentangan mereka dengan hegemoni Amerika Serikat, sekaligus upaya untuk memaksimalkan

perolehan kekuatan demi mempertahankan diri dari ketidakpastian sistem internasional.

Tentunya, intensi ofensif yang masih menjadi pusat perhatian komunitas internasional adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut hingga saat ini. Menurut argumentasi Knott (2023), Kumar (2023), dan Oksamytna (2023), konflik tersebut di dorong oleh perspektif Rusia yang menganggap bahwa Ukraina yang independen, merupakan ancaman eksistensial bagi kepentingan nasionalnya. Konflik yang telah berjalan hampir dua tahun, telah merenggut ribuan korban jiwa dan disebut sebagai konflik terbesar di tanah Eropa sejak Perang Dunia Kedua (Hirsh, 2022; Wallace, 2022). Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan Jepang (2022) melihat bahwa perilaku invasi Rusia terhadap Ukraina merupakan ancaman besar terhadap perdamaian internasional. Upaya untuk memenuhi kepentingan nasional melalui agresi unilateral, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional serta mengancam tatanan dunia internasional yang di dasari oleh tatanan dunia liberal. Jepang melihat invasi tersebut dengan kecemasan dan kekhawatiran. Pasalnya konflik serupa dapat terjadi kepada Jepang yang masih memiliki persengketaan wilayah dengan Rusia di pulau Kuril (Japan Ministry of Defense, 2022). Maka, hal tersebut dikhawatirkan akan menarik Rusia untuk berkonflik dengan Jepang dengan perebutan wilayah sebagai justifikasinya.

Dalam kajian geopolitik di Asia Timur, tentunya Cina merupakan aktor lain yang kerap menunjukkan intensi agresif dan asertif dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Selain permasalahan terkait isu lintas selat, Laut Cina Selatan, dan konflik perbatasan dengan India, Cina juga sering melanggar batas teritorial dari wilayah laut dan udara Jepang. Pada tahun 2022, sebuah kapal perang milik angkatan laut Cina dengan sengaja melanggar kedaulatan laut Jepang di sekitar Pulau Senkaku (Kosuke T. , 2022). Tidak lama setelah itu, kapal perang Cina kembali melakukan pelanggaran tersebut pada bulan Februari tahun 2023 di wilayah laut Kepulauan Kagoshima (The Japan Times, 2023). Selain pelanggaran daerah teritorial laut, Cina juga melakukan hal yang serupa pada wilayah udara Jepang. Tercatat bahwa pada periode 2019-2021, Kementerian Pertahanan Jepang (2022) melihat adanya pelanggaran udara oleh Cina yang berupa balon udara sebanyak tiga kali. Balon tersebut

diduga sebagai instrumen spionase Cina untuk memata-matai dan memperoleh informasi sensitif terkait pertahanan Jepang (Japan Ministry of Defense, 2022). Selain itu, Pesawat tempur Cina kerap melanggar wilayah udara Jepang dengan sengaja terbang di atas wilayah bagian barat daya, khususnya di Pulau Okinawa dan Senkaku. Melalui wawancara dengan CNN pada tahun 2020, Lt. Col. Takamichi Shiota selaku salah satu pilot dari angkatan udara Jepang, mengatakan bahwa hampir 70% misi pencegatannya dilakukan di wilayah barat daya untuk menjawab pelanggaran udara dari pesawat tempur dan pembom Cina (Lendon & Wakatsuki, 2020). Oleh karena itu, intensi ofensif Cina merupakan hal lain yang dianggap mengkhawatirkan bagi Jepang.

Aktor lain yang juga dianggap ancaman berkati kebijakan luar negerinya yang agresif adalah Korea Utara. Secara spesifik, Kementerian Pertahanan Jepang (2022) berfokus pada uji coba persenjataan nuklir jarak jauh Korea Utara yang kemudian melanggar hukum internasional dan membahayakan kedaulatan serta nyawa dari warga Jepang. Pasalnya, uji peluncuran rudal penjelajah ke udara, umum berakhir dengan kejatuhan misil tersebut di laut wilayah Jepang. Seperti contoh pada akhir tahun 2022, Korea utara meluncurkan kurang lebih 29 rudal balistik dengan hulu ledak nuklir yang kemudian jatuh tepat di perairan perbatasan antara Jepang dan Korea Selatan (Sang-Hun & Rich, 2022). *James Martin Center for Non-Proliferation Studies* (2023) mencatat bahwa pada tahun 2022 Korea Utara telah meluncurkan kurang lebih 68 uji coba persenjataan nuklir, dan merupakan uji coba terbanyak yang pernah dilakukan negara tersebut. Intensi ofensif lainnya juga terlihat dari retorika-retorika pernyataan internasional yang melakukan provokasi dalam menggunakan persenjataan nuklirnya. Rezim Kim Jong-un, sering kali menggertak komunitas internasional dengan mengumumkan ancaman penggunaan senjata nuklir, bahkan sejauh memunculkan doktrin kebijakan pertahanan diri yang membolehkan Korea Utara untuk melakukan serangan ‘pertama’ (Reuters, 2022). Demikian dapat dikatakan bahwa serupa

seperti Rusia dan Cina, Korea Utara juga kerap menunjukkan intensi agresif yang dapat dipersepsikan sebagai ancaman bagi komunitas internasional, termasuk dalam hal ini terhadap Jepang.

Setelah mengoperasionalkan keempat faktor di atas, dapat dipahami mengapa Jepang kemudian melakukan transformasi pertahanan dan meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanannya. Ancaman yang ditimbulkan baik oleh Korea Utara, Cina dan Rusia, mendorong Jepang untuk mempertahankan diri meskipun dihadapi oleh limitasi material dan konstitusi. Dengan kembali menelisik indikator dari teori *balance of threat*, terlihat bahwa Cina merupakan aktor yang paling mengancam dari ketiga negara tersebut. Agregat kekuatan yang masif, kapabilitas ofensif yang unggul dalam segi kuantitas dan kualitas dan mampu dijadikan sebagai alat proyeksi strategis, serta bukti adanya agresi nyata terhadap wilayah Jepang merupakan landasan dari reaksi Jepang yang dikategorikan inkonsisten terhadap kondisi material dan komitmennya kepada komunitas internasional. Dihadapi oleh ketidakpastian dan agresi yang dipertontonkan oleh ketiga negara, Jepang melihat hal tersebut sebagai sebuah ancaman dan kemudian bertindak dengan cara meningkatkan kapabilitasnya secara mandiri. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa perilaku Jepang melakukan transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanan secara masif, adalah reaksi terhadap lingkungan geopolitiknya yang semakin mengancam kepentingan dan kedaulatan nasionalnya.

Kemudian berdasarkan temuan penelitian di atas, transformasi pertahanan yang dilakukan oleh Jepang di tahun 2023 bisa dipahami sebagai kebijakan atau strategi keamanan jangka panjang. Melihat tren intensi ancaman yang semakin nyata, kemungkinan besar Jepang akan terus melanjutkan dan bahkan mengekspansikan upaya transformasi guna mengurangi ketidakpastian dan ancaman. Hal ini juga dapat diterjemahkan bahwa Jepang akan secara perlahan mengurangi ketergantungannya terhadap konfigurasi aliansinya dengan Amerika Serikat. Kenyataan ini merupakan konsekuensi logis dari keberlanjutan empat variabel utama teori yang digunakan. Maka, *balance of threat* dapat membaca dan memprediksi hal yang akan terjadi. Apabila manuver geopolitik Cina, Korea Utara, dan Rusia masih dipersepsikan tinggi oleh Jepang di tahun-tahun berikutnya, maka kemungkinan besar

Tokyo akan melanjutkan proses transformasi pertahanannya. Namun, apabila intensitas yang dipersepsikan menurun, maka tidak menutupi proses transformasi tetap berjalan namun dalam tempo integrasi pertimbangan politik domestik secara lebih bijaksana.

SIMPULAN

Memasuki tahun 2023, Kementerian Pertahanan Jepang menerbitkan buku putih pertahanan terbaru yang berisi laporan komprehensif terkait aspek pertahanan negaranya. Secara garis besar, laporan tersebut menyatakan bahwa Jepang akan segera memulai transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanannya secara drastis, melebihi tahun-tahun sebelumnya. Mengingat bahwa Jepang sampai dengan saat tersebut masih terjebak dalam stagnasi ekonomi berkepanjangan, serta terus memegang teguh prinsip pasifisme dan non-militerisme yang tercantum pada konstitusinya, perkembangan ini tentunya memunculkan pertanyaan besar akan motivasinya melaksanakan apa yang bisa disebut sebagai remiliterisasi besar-besaran meski terdapat hambatan-hambatan berarti. Menggunakan teori *Balance of Threat*, penelitian ini berargumen bahwa persepsi Jepang terhadap ancaman yang ada di lingkungan geopolitiknya, memiliki pengaruh signifikan terhadap dicanangkannya agenda transformasi dan peningkatan kapabilitas pertahanan.

Dengan mengukur menggunakan empat indikator, yaitu: agregat kekuatan, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan intensi ofensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam buku putih pertahanan Jepang, yakni: Rusia, Korea Utara, dan Cina, berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melalui cara yang dianggap revisionis dan asertif oleh komunitas internasional. Manuver geopolitik ketiga negara di atas dapat dikategorikan sebagai perilaku antagonis yang kemudian menimbulkan animositas dan ketidakpastian dalam struktur kawasan Asia-Pasifik. Hal ini tentunya dilihat oleh Jepang sebagai ancaman nyata tidak hanya terhadap kestabilan geopolitik regional, tetapi juga

terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Jepang sebagai sebuah negara. Dihadapi oleh ketidakpastian yang semakin meningkat, Jepang terpaksa menjawab tantangan keamanan tersebut dengan tidak hanya mempertahankan pengaturan aliansinya dengan Amerika Serikat, tetapi juga mengambil langkah yang lebih jauh dengan melakukan transformasi pertahanan sebagai upaya bertahan dan mengurangi ketidakpastian di dalam kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. G. (2016). Japan's Economic Performance "Lost Decade": Myth, Reality, or Role Model? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 3(1), 15-32.
- Asia Pacific Foundation of Canada. (2023, May 9). *Debate Rages in Japan Over Whether to Revise World's Oldest Unamended Constitution*. Retrieved from <https://www.asiapacific.ca/publication/debate-rages-japan-over-whether-revise-worlds-oldest>
- Bochorodycz, B. (2024). The security policy community and the consensus on the US–Japan alliance: the role of think tanks, experts and the alliance managers. *The Pacific Review*, 37(5), 853-883. doi:<https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2246664>
- Bradshaw, M. J., & Connolly, R. (2016). Russia's natural resources in the world economy: history, review and reassessment. *Eurasian Geography and Economics*, 57, 700-726.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Canfield, J., & Haddad, M. A. (2021). Japan's Alliance-Enhancing Security Developments. *Asia Policy*, 16(4), 167-193.
- Defense Intelligence Agency. (2021). *North Korea Military Power: A Growing Regional and Global Threat*. Defense Intelligence Agency.
- Dooley, B. (2023, July 28). *Japan Affirms Plans for Deeper Regional Ties to Counter China*. Retrieved from The New York Times: [https://www.nytimes.com/2023/07/28/world/asia/japan-military-white-](https://www.nytimes.com/2023/07/28/world/asia/japan-military-white-paper.html)
- [paper.html](https://www.nytimes.com/2023/07/28/world/asia/japan-military-white-paper.html)
- Govindasamy, G. (2023). Evolution of Japan's Pacifist to Realist Diplomacy: From Yoshida Shigeru to Fumio Kishida. *Wilayah: The International Journal of East Asian Studies*, 12(2), 57-68.
- Gustafsson, K. (2020). Temporal othering, de-securitisation and apologies: Understanding Japanese security policy change. *Journal of International Relations and Development*, 23, 511-534.
- Ha, T.-N., & Hagstrom, L. (2023). Resentment, status dissatisfaction, and the emotional underpinnings of Japanese security policy. *International Relations of the Asia-Pacific*, 23, 383-415.
- Hirsh, M. (2022, February 24). *Why Putin's War Is the West's Biggest Test Since World War II*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2022/02/24/russia-ukraine-war-west-world-war-2/>
- Hughes, C. W. (2016). Japan's 'Resentful Realism' and Balancing China's Rise. *The Chinese Journal of International Politics*, 109-150.
- Hughes, C. W., Patalano, A., & Ward, R. (2021). Japan's Grand Strategy: The Abe Era and its Aftermath. *Survival*, 63(1), 125-160.
- IISS. (2023). *The Military Balance 2023*. (J. Hackett, Ed.) London: Routledge.
- Japan Ministry of Defense. (2022, December 22). *Defense of Japan 2023 (Annual White Paper)*. Retrieved from Ministry of Defense: https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/index.html
- Japan Ministry of Defense. (2022). *Defense Programs and Budget of Japan*.
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (2022). *Defense Buildup Program*. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000082.html
- Juanbo, P. (2019). Analysis Of Japan's Long Lasting Recession Since 1990s. *The Frontiers of Society, Science and Technology*, 1(5), 19-29.

- Kjellen, J. (2022). The Russian Northern Fleet and the (Re)militarisation of the Arctic. *Arctic Review on Law and Politics*, 13, 34-52.
- Knott, E. (2023). Existential nationalism: Russia's war against Ukraine. *Nations and Nationalism*, 29, 45-52.
- Kosuke, T. (2022, November 3). *China's Navy Sets Record Pace for Intrusions Into Japan's Territorial Sea*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2022/11/chinas-navy-sets-record-pace-for-intrusions-into-japans-territorial-sea/#:~:text=The%20Japanese%20Ministry%20of%20Defense%20announced%20on%20November,into%20Japan%E2%80%99s%20waters%20this%20year%2C%20a%20record%20high>.
- Kosuke, T. (2023, July 27). *China-Russia Joint Military Drills a 'Grave Concern' for Japan*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2023/07/china-russia-joint-military-drills-a-grave-concern-for-japan/>
- Kumar, A. (2023). An analytical study of Russia-Ukraine war in reference to the offensive realist. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 18(3), 926-933.
- Kwak, T.-H. (1990). Military Capabilities of South and North Korea: A Comparative Study. *Asian Perspective*, 14(1), 113-143.
- Lamont, C. W. (2015). *Research Methods in International Relations* (1st ed.). SAGE Publication.
- Landau-Wells, M. (2024). Building from the Brain: Advancing the Study of Threat Perception in International Relations. *International Organization*, 78, 627-667. doi:10.1017/S0020818324000328
- Lendon, B. (2022, July 8). *China is relentlessly trying to peel away Japan's resolve on disputed islands*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2022/07/08/asia/japan-china-senkaku-islands-ships-intl-hnk-mic-ml/index.html>
- Lendon, B., & Wakatsuki, Y. (2020, July 29). *Japan's air force faces a 'relentless' burden, imposed by China*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2020/07/28/asia/japan-china-fighter-jet-scrambles-intl-hnk-dst/index.html>
- Liff, A. P. (2018). Japan's National Security Council: Policy Coordination and Political Power. *Japanese Studies*, 38(2), 253-279.
- Lucev, J. (2014). How Long Before NATO Aircraft Carrier Force Projection Capabilities Are Successfully Countered. *CIRR*, 71, 121-151.
- Matsuda, T. (2023). Japan's Emerging Security Strategy. *The Washington*, 46(1), 85-102.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mizokami, K. (2021, June 22). *North Korea Might Have Lots of Guns, But Are They Any Good?* Retrieved from National Interest: <https://nationalinterest.org/blog/reboot/north-korea-might-have-lots-guns-are-they-any-good-188376>
- Nagatomi, S. (2025, August 8). *Japan deploys 1st F-35B stealth fighters to bolster island defenses*. Retrieved from Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/politics/defense/japan-deploys-1st-f-35b-stealth-fighters-to-bolster-island-defenses>
- Nakano, R. (2023). Japan and the liberal international order: rules-based, multilateral, inclusive and localized. *International Affairs*, 99(4), 1421-1438. doi:10.1093/ia/iad166
- Nye, J. S. (1990). The Changing Nature of World Power. *Political Science Quarterly*, 105(2), 177-192.
- Oksamytna, K. (2023). Imperialism, supremacy, and the Russian invasion. *Contemporary Security Policy*, 44(4), 497-512.
- Panella, C. (2024, April 18). *Japan showed off the destroyer it's turning into an aircraft carrier for F-35 stealth fighters*. Retrieved from Business Insider: <https://www.businessinsider.com/japan-shows-off-upgraded-aircraft-carrier-capable-of-launching-f35s-2024-4>
- Person, R. (2017). Balance of threat: The domestic insecurity of Vladimir Putin. *Journal of Eurasian Studies*, 8, 44-59.
- Prime Minister's Office of Japan. (n.d.). *Constitution of Japan*. Retrieved

- from
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
- Radio Free Asia. (2021, March 11). *North Korean Youth Find Ways to Dodge Military Service*. Retrieved from <https://www.rfa.org/english/news/korea/conscription-03112021161527.html>
- Reuters. (2022, September 9). *Kim Jong Un says North Korea's new law allowing pre-emptive nuclear strikes is 'irreversible'*. Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2022-09-09/new-north-korea-law-outlines-nuclear-weapons-use-including-preem/101425072>
- Ross, R. S. (1999). The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-First Century. *International Security*, 23(4), 81-118.
- Rubel, R. C. (2011). The Future of Aircraft Carriers. *Naval War College Review*, 64(4), 12-27.
- Sang-Hun, C., & Rich, M. (2022, November 2). *North Korea Fires 6 More Missiles Toward Japan, Including an ICBM*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2022/11/02/world/asia/north-korea-missile-japan.html>
- Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In. *International Security*, 19(1), 72-107.
doi:<https://doi.org/10.2307/2539149>
- Singh, B. (2016). Japan Embraces Internationalism: Explaining Japanese Security Policy Expansion through an Identity-Regime Approach. *Japanese Journal of Political Science*, 17(4), 589-613.
- SIPRI. (2023). *SIPRI Yearbook 2023: Armaments, Disarmament and International Security*. Stockholm: SIPRI.
- Sutardi, A. M., & Pasha, J. A. (2025). Semiconductor Dependence as Catalyst For The Passage of Japan's 2022. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 4(3), 122-136. doi:10.24198/aliansi.v4i3.63936
- The Japan Times. (2023, June 8). *Chinese navy ship enters Japanese waters near Kagoshima islands*. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/08/national/china-navy-ship-kagoshima/>
- Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/08/national/china-navy-ship-kagoshima/>
- The World Bank. (n.d.). *Russian Federation*. Retrieved from The World Bank Data: <https://data.worldbank.org/country/russian-federation>
- Trevelyan, M. (2022, April 21). *Russia tests nuclear-capable missile that Putin calls world's best*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/europe/russia-tests-new-intercontinental-ballistic-missile-2022-04-20/>
- Tsai, T.-C., & Liu, T. T.-T. (2023). China Rising and the Emerging Carrier Arms Race in the Indo-Pacific: Strategic Competition and Balance of Power. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 35(2), 231-251.
- U.S Department of Defense. (2022). *Military and Security Developments Involving The People's Republic of China*. U.S Department of Defense.
- Wallace, D. (2022, February 24). *Russia invades Ukraine in largest European attack since WWII*. Retrieved from Fox News: <https://www.foxnews.com/world/russian-invades-ukraine-largest-europe-attack-wwii>
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4), 3-43.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing.
- Wang, O. (2023, July 29). *China hits out at Japan's 'erroneous' defence white paper*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3229365/china-hits-out-japans-erroneous-defence-white-paper>
- World Bank. (n.d.). *GDP (current US\$)*. Retrieved from The World Bank Data: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_

value_desc=true

- Xuanzun, L. (2023, March 13). *China's 3rd aircraft carrier Fujian 'makes smooth progress' in mooring trials ahead of expected maiden voyage*. Retrieved from Global Times: <https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287212.shtml>
- Yokodaido, S. (2019). Constitutional stability in japan not due to popular approval. *German Law Journal*, 20, 263-283. doi:10.1017/glj.2019.16